

**PERAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
WILAYAH III PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MENURUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 154 TAHUN 2016**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

SONIA OKTAVIANI
1710012111202

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No : 07/Skripsi/HTN/FH/III-2021

Nama : Sonia Oktaviani
NPM : 1710012111202
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website* :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H (Pembimbing I)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**PERAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
WILAYAH III PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MENURUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 154 TAHUN 2016**

Sonia Oktaviani¹, Sanidjar Pebrihariati R.¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: soniaoktaviani384@gmail.com

Indonesian transportation plays an important role as a means of connecting, including sea transportation related to the implementation of ferry ports carried out by BPTD, Regulation of the Minister of Transportation Number 154 of 2016. This type of research is sociological juridical research. Primary data and secondary data sources, data collection techniques by interview and document study. 1) The role of BPTD Region III is to supervise the operation of the Bungus Bay crossing port for 24 hours. 2) the obstacles faced by BPTD Region III West Sumatra are that there is only one pier, and 2 (two) ships. 3) Efforts made by BPTD Region III are still planning to repair and build a pier which is budgeted for this year.

Keywords: Role, Land Transportation Management Agency, Ferry Port

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, transportasi di Indonesia memegang peranan penting sebagai sarana penghubung antara satu kota ke kota yang lainnya, bahkan dapat menghubungkan satu negara ke negara lainnya. Transportasi dapat menunjang perekonomian dalam negara dengan memudahkan transfer teknologi, ilmu pengetahuan, maupun perdagangan.¹

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki sebuah pelabuhan di teluk bungus yang menghubungkan Kota Padang dengan Kepulauan Mentawai, namun karena biaya pengelolaannya sangat mahal maka pengelolaan pelabuhan samudera teluk bungus, diambil alih oleh pusat melalui Kementerian Perhubungan

(Kemenhub), dan pihak yang akan melakukan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan tersebut adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Sumatera Barat.

BPTD Wilayah III berada di Provinsi Sumatera Barat dengan Tipe B, sebagaimana hal ini dapat diketahui pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian berjudul **“Peran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan

¹ Perikanan Indonesia, 2019, *Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim*, <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, diakses pada Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

Samudera Teluk Bungus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016?

2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus?
3. Apakah Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus?

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis. Sumber Data yang terbagi menjadi data primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016

Terkait peran penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan teluk bungus dilakukan oleh Satuan Pelayanan bidang Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan BPTD Wilayah III

Sumatera Barat, adapun peran dari Satuan Pelayanan tersebut meliputi Pengawasan dan Pelayanan.³

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus

1. Dermaga

salah satu faktor penghambat yang ditemui adalah kurangnya dermaga di pelabuhan teluk bungus.

Bahwa dermaga yang dimiliki oleh pelabuhan teluk bungus sampai sejauh ini yang beroperasi hanya satu dermaga.

2. Moda Transportasi

Moda transportasi ini yang berada di pelabuhan teluk bungus hanya berjumlah dua unit.

3. Sumber Daya Manusia

Terkait personil/sumber daya manusia yang masih kurang, bahwa untuk standar minimal personil yang harus berada di pelabuhan adalah berjumlah 40 (empat puluh) personil.⁴

C. Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus

Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan

³ Hasil wawancara dengan Staff BPTD Wilayah III Sumatera Barat Satuan Pelayanan Pelabuhan Teluk Bungus, Bapak Ngadimun

⁴ Hasil wawancara dengan Koordinator BPTD Satuan Pelayanan (KORSATPEL) APP Pelabuhan Teluk Bungus, Bapak Agus Sumarso.

² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus adalah Kedepan masih direncanakan perbaikan dan pembangunan yang dimana sudah dianggarkan dalam tahun ini, usulan anggaran diajukan ke Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat adalah Pengawasan operasional pelabuhan penyeberangan teluk bungus dilakukan oleh Satuan Pelayanan pelabuhan teluk bungus BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat selama 24 jam.

Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat adalah Dermaga yang dimiliki hanya satu dermaga, Moda transportasi yang berada di pelabuhan teluk bungus hanya berjumlah dua unit, dan Sumber Daya Manusia yang masih kurang berada dilokasi pelabuhan penyeberangan teluk bungus.

Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat adalah kedepan masih direncanakan perbaikan dan pembangunan yang dimana sudah dianggarkan dalam tahun ini. Usulan Anggaran Pembangunan yang diajukan kepada Kementerian Perhubungan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Agar Kementerian Perhubungan agar lebih memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Khususnya BPTD Wilayah III Sumatera Barat
2. Agar Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumatera Barat agar dipercepat proses

pembangunan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus

3. Agar masyarakat sekitar di pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus agar lebih patuh dan taat akan aturan yang dibuat oleh BPTD Wilayah III Sumatera Barat, sehingga tercipta kenyamanan di lingkungan pelabuhan penyeberangan teluk bungus.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan yang diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H** selaku pembimbing penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Staff BPTD Wilayah III Sumatera Barat Satuan Pelayanan Pelabuhan Teluk Bungus, Bapak Ngadimun.

Hasil wawancara dengan Koordinator BPTD Satuan Pelayanan (KORSATPEL) APP Pelabuhan Teluk Bungus, Bapak Agus Sumarso.

Perikanan Indonesia, 2019, *Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim*, <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>